

Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah menyerahkan bukti-bukti dan nama pejabat yang terindikasi menerima aliran suap, termasuk foto-foto istri pejabat yang menggunakan fasilitas negara.

Desakan tersebut juga dilakukan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) serta Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Mereka pun melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tak kunjung ditetapkannya tersangka kasus tersebut oleh KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini upaya perubahan kuota haji di surat keputusan menteri dilakukan untuk menghindari terendusnya praktik rasuah. Sebab, bila dituangkan dalam peraturan menteri, harus ditayangkan dalam lembaran negara.

“Nah, yang tanda tangan siapa? Dia tahu sendiri undang-

undangnya jelas. Itu pun hanya untuk mengatur ini loh ya. Oh, Jawa Barat dapat berapa, Jawa Timur dapat berapa. Itu peraturan dan induknya tetap 92% reguler, 8% untuk khusus,” jelas Boyamin, kemarin.

Ita juga menduga telah terjadi pungutan liar. KPK sejatinya tinggal menghitung selisih berapa harusnya yang didapatkan oleh negara dan keuntungan bagi swasta. Audit ini disebut tidak perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), alias cukup audit internal di KPK.

TUNGGU PENYIDIK

Ketua KPK Setyo Budiyo menjelaskan pihaknya menunggu penyidik pulang dari Arab Saudi untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2023-2024.

“Nanti laporannya pasti akan kami kaji, (karena) dilaporkan kepada pimpinan. Nah dari situ, apakah ada tindak lanjut untuk pemeriksaan atau mungkin ada kegiatan tambahan dan

“ Penyidik masih mengumpulkan data, mengecek sejumlah lokasi, dan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Setyo Budiyo
Ketua KPK

lain-lain. Keputusannya setelah itu,” ucap Setyo, Rabu (3/12) malam.

Setyo menyebut langkah selanjutnya baru diputuskan setelah penyidik pulang dari Arab Saudi karena KPK terlebih dahulu menginginkan informasi yang bulat dan detail.

Dia menambahkan, penyidik masih mengumpulkan data, mengecek sejumlah lokasi, dan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan dugaan penyidikan dengan kondisi di lapangan. “Harapan kami, mereka mungkin diperkirakan baru minggu depan, ya,

(atau) mungkin minggu ini, akhir minggu ini lah baru pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, kemudian mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicegah ialah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Kemudian, pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut. Bahkan, Pansus Angket Haji DPR RI menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. (Yon/Ant/P-2)